



## KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL: PENYELUNDUPAN MANUSIA DALAM JARINGAN SNAKEHEADS CINA

Angelica Putri Arindrayani<sup>1\*</sup>, Sarah Anabarja<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Airlangga; Indonesia

\*email: angelicaputriarindrayani@gmail.com

### *Abstract*

*Human smuggling as an embodiment of transnational organized crime is a form of transnational illegal trade. A widely traded commodity is migrants, and one human smuggling network with an extensive cross-border network is China-based Snakeheads. This article applies qualitative methods with secondary data collection to elaborate on the development and interaction patterns of Chinese Snakeheads as well as their resilience strategies. By utilizing the social network theory and dependency theory, the results show that both smugglers and migrants have a strong urge to leave no trace by using the social ties and resources they have. Smuggling routes often involve transit countries, where such countries may have incentives to allow efficient underground smuggling systems rather than risk-generating longer smuggling routes. The smugglers themselves have developed various strategies to encourage their transactions, flexibility, and resilience as a smuggling business to ensure the success of the smuggling process.*

**Keywords:** *Chinese Snakeheads, human smuggling, Transnational Organized Crime*

### **Abstrak**

Penyelundupan manusia sebagai salah satu wujud kejahatan terorganisir transnasional adalah bentuk perdagangan ilegal lintas negara. Komoditas yang banyak diperdagangkan adalah migran, dan salah satu jaringan penyelundupan manusia dengan jaringan lintas-negara yang luas adalah Snakeheads yang berbasis di Cina. Artikel ini menerapkan metode kualitatif dengan pengumpulan data sekunder untuk mengelaborasi pola perkembangan dan interaksi dari *Snakeheads* Cina sekaligus strategi bertahan mereka. Dengan berlandaskan pada teori jejaring sosial dan teori ketergantungan, hasil menunjukkan bahwa baik penyelundup maupun migran memiliki dorongan kuat untuk tidak meninggalkan jejak dengan menggunakan ikatan sosial dan sumber daya yang mereka miliki. Rute penyelundupan sering kali melibatkan negara transit, di mana negara tersebut mungkin memiliki dorongan untuk mengizinkan sistem penyelundupan bawah tanah yang efisien daripada mengambil risiko dalam menghasilkan rute penyelundupan yang lebih panjang. Para penyelundup sendiri telah mengembangkan beragam strategi untuk mendorong transaksi, fleksibilitas, dan ketahanan mereka sebagai bisnis penyelundupan guna menjamin keberhasilan proses penyelundupan.

**Kata Kunci:** kejahatan terorganisir transnasional, penyelundupan manusia, *Snakeheads* Cina

## Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, globalisasi telah menciptakan dunia dalam sebuah keterhubungan dan ketergantungan. Batas negara seolah-olah menjadi pudar, di mana perpindahan informasi, gagasan, barang, dan orang dapat bergerak secara mudah dan cepat (Keohane & Nye Jr, 1973). Selain menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan ekonomis, globalisasi juga mengalami pergeseran makna dalam isu hak asasi manusia (HAM). Kejahatan terorganisir transnasional (*Transnational Organized Crime, TOC*) kemudian muncul sebagai salah satu contoh kelompok kegiatan ilegal yang berorientasi pada keuntungan lintas batas negara, yang sejatinya keberadaannya telah difasilitasi oleh globalisasi. Kemajuan dalam komunikasi dan transportasi merupakan pendorong utama globalisasi, dan Revolusi Industri 5.0 turut memainkan peran penting didalamnya.

Dengan berfokus pada integrasi teknologi mesin serta model produksi yang mengolaborasikan manusia dan mesin, misalnya *Artificial Intelligence*, Revolusi Industri 5.0 kemudian memperluas konektivitas global dan menyokong infrastruktur komunikasi: memfasilitasi kerangka kerja teknologi yang lebih canggih untuk mendukung globalisasi melalui pertukaran informasi lintas batas yang lebih cepat dan efisien. Kendati demikian, globalisasi juga membuka peluang baru bagi berkembangnya TOC, juga kejahatan dunia maya, perdagangan ilegal, pencucian uang, meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial, serta permintaan yang tinggi akan barang dan jasa ilegal (Kleemans & Smit, 2014). Poulin (2003) mengemukakan bahwa globalisasi kapitalis telah menyebabkan komodifikasi manusia, yaitu keberadaan manusia yang digunakan sebagai obyek atau komoditas yang diperdagangkan dan diselundupkan.

Penyelundupan manusia yang berbasis Cina kemudian menjadi salah satu bentuk TOC paling serius di Amerika Serikat (AS) (Zhang & Chin, 2003). Setiap tahun, sepuluh ribu orang dari Cina diselundupkan ke Amerika Serikat oleh mafia Cina yang dikenal sebagai jaringan *Snakeheads* (Chin, 2014). *Snakeheads* sendiri adalah jaringan untuk orang-orang yang paling mengetahui informasi terkini mengenai mekanisme penyelundupan dari Cina, yakni yang mencakup hukum, situasi politik, dan jalur-jalur penyelundupan (Kyle & Liang, 2001). Kejahatan yang mereka lakukan terutama beroperasi pada penyelundupan dan perdagangan manusia. Keduanya bersifat transnasional dan melibatkan banyak tugas yang sangat khusus dan operasi yang rumit

(Zhang & Chin, 2001). Penyelundupan manusia dari Cina ke AS telah mendapat perhatian besar dari penegak hukum dan pejabat pemerintah AS sejak 1993, yaitu saat kapal *Golden Venture* kandas di New York dengan hampir 300 imigran ilegal Cina di dalamnya (Bolz, 1995; Nizmi, 2016; Saadah, 2021; Zhang & Chin, 2003).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Cina dan AS untuk mengatasi fenomena ini; banyak pula orang yang meninggal selama perjalanan penyelundupan dari Cina ke AS. Namun kematian ternyata tidak mampu menghentikan berlangsungnya bisnis penyelundupan. Artikel ini kemudian berupaya memahami fenomena penyelundupan manusia, khususnya dalam kasus *Snakeheads* Cina sebagai bentuk kejahatan terorganisir transnasional. Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk memahami perkembangan serta pola bertahan *Snakeheads* Cina sehingga dikatakan sebagai bentuk TOC paling serius di Amerika Serikat. Menurut penulis, dalam kasus penyelundupan manusia, *Snakeheads* telah berkembang sedemikian rupa dan melibatkan jaringan koneksi yang sangat luas sehingga rantai penyelundupan pun sangat kompleks dan sulit untuk dipatahkan.

Hal lain yang juga mendukung luasnya koneksi *Snakeheads* meliputi koordinasi internal pihak penyelundup, rute kompleks penyelundupan, serta strategi bertahan penyelundup. Hal-hal tersebut menyebabkan banyak kasus penyelundupan manusia menjadi sulit dilacak dan ditangani. Fenomena penyelundupan manusia oleh *Snakeheads* cenderung naik pada tahun 1990an, dan menjadi kurang dibahas seiring berjalannya waktu. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan apakah ada kaitannya dengan peristiwa tertentu, misalnya penangkapan figur utama atau dalang dibalik kelompok *Snakeheads* tersebut. Lebih lanjut, artikel ini bertujuan memahami fenomena jaringan dan relasi sosial dalam perkembangan *Snakeheads* sebagai kegiatan bisnis penyelundupan; kontribusi distrik Fujian dalam pergerakan para migran; dan adanya keterlibatan perempuan dalam organisasi penyelundupan manusia tersebut.

## Metodologi

Artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan pola perkembangan *Snakeheads* Cina serta strategi bertahan mereka sebagai salah satu jaringan kejahatan terorganisir transnasional. Metode kualitatif menggarisbawahi pengumpulan informasi dan data yang bersifat non-numerik atau non-kuantitatif (Bryman, 2016). Hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan deskriptif secara menyeluruh mengenai

kondisi yang terjadi, yakni gambaran secara spesifik dari suatu situasi, latar belakang sosial-ekonomi, dan alasan dibalik keterlibatan para migran dengan para penyelundup. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2008) bahwa dinamika permasalahan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan latar belakang budaya yang ada di sekitarnya. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Data dan informasi tersebut diperoleh dari literatur-literatur sebelumnya yakni buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang memiliki relevansi dengan kajian artikel ini.

### *Pendekatan Jejaring Sosial*

Keterikatan sosial, modal sosial, dan jaringan kriminal (*social embeddedness, social capital and criminal networks*) atau yang juga disebut dengan pendekatan jejaring sosial sebagaimana dikemukakan oleh Kleemans (2014b) yang menggarisbawahi pentingnya ikatan sosial dan interaksi sosial dalam perkembangan masyarakat yang dinamis. Pendekatan ini dilihat sebagai perspektif yang tepat untuk menggambarkan bentuk realitas empiris penyelundupan manusia oleh *Snakeheads* Cina. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana *Snakeheads* sebagai kelompok kejahatan terorganisir transnasional tidak beroperasi dalam ruang sosial hampa melainkan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Kleemans & Van de Bunt, 1999; Morselli, 2009). Menyadari berbagai risiko yang muncul dari kegiatan penyelundupan manusia sebagai aktivitas ilegal transnasional yang harus disembunyikan, para penyelundup melakukan transaksi berdasarkan aturan dan mekanisme “kepercayaan”. Gagasan ini turut dikonfirmasi oleh Wellman & Berkowitz (1988) dan Granovetter (1985) yang mengemukakan bahwa kepercayaan itu sendiri didapat dengan cara membangun koneksi, di mana masalah ketidakpercayaan ekonomi dikesampingkan dengan fakta bahwa transaksi ini “tertanam” dalam jaringan hubungan pribadi.

Penyelundup memanfaatkan peluang dengan menggunakan sumber daya yang ada yakni melalui relasi, modal finansial, dan pengetahuan. Penggunaan sumber daya dan relasi sosial sangat membantu pelaku untuk mengetahui bahwa mereka mungkin akan bertemu lagi di masa mendatang. Sebab relasi sosial juga dapat menghilangkan masalah ketidakpercayaan dan kecurigaan dalam operasional kegiatan penyelundupan manusia. Kerja sama dalam kejahatan terorganisir memang sulit, namun akan menjadi lebih mudah

apabila pihak terkait memiliki informasi tentang satu sama lain, dan informasi akan didapat dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Selain itu, pendekatan jejaring sosial juga mengacu pada hukum jarak sosial dan geografis, yaitu pengelompokan orang berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang, jarak geografis, etnis, pendidikan, usia, dan sebagainya (Feld, 1981). Orang-orang yang tumbuh bersama atau yang tinggal di lingkungan yang sama, di kemudian hari, dapat menjadi teman dalam kejahatan, atau dapat menjadi anggota kelompok kriminal yang sama. Dari sini, pendekatan jejaring sosial dipandang tepat dalam mencerminkan perkembangan kelompok *Snakeheads*.

Selain dalam kasus *Snakeheads* Cina, pendekatan jejaring sosial sebagaimana dikemukakan oleh Kleemans (2014b) juga dapat relevan dalam isu hubungan internasional, dengan mempertimbangkan bagaimana jaringan sosial dan modal sosial mempengaruhi perilaku dan interaksi antara aktor dalam lingkup internasional, termasuk negara-negara. Misalnya, dalam kondisi krisis, bantuan kemanusiaan dapat dipandang sebagai hasil dari jaringan sosial dan modal sosial yang ada di antara negara-negara dan lembaga internasional. Selain itu, dalam konteks diplomasi atau kerja sama lintas negara, jaringan sosial dan modal sosial dapat menjadi faktor penting dalam membangun solidaritas dan kepercayaan (Granovetter, 1985; Wellman & Berkowitz, 1988).

Dalam kasus Afrika misalnya, kawasan Afrika Barat (Guinea, Mauritania, dan Niger) berhadapan dengan masalah bencana alam, krisis pangan, penyakit, dan ketidakstabilan ekonomi-politik yang salah satunya disebabkan oleh jaringan *drug trafficking* dan penjualan senjata ilegal (Retnowatik & Pasan, 2021). Sementara itu, wilayah Tanduk Afrika (Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia) mengalami konflik bersenjata, bencana alam, kekerasan, kekeringan, dan *displacement* hingga menjadikan wilayah tersebut sebagai yang paling kritis di benua Afrika. Di Somalia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa dalam kurun waktu 18 tahun, sebanyak 4.000.000 orang telah mengungsi akibat konflik kekerasan dan angka ini meningkat dua kali lipat di tahun 2010 (Martlew, 2009). Di sisi lain, Kenya yang dilanda krisis pangan telah mengakibatkan sebanyak 3,5 juta penduduknya menderita kelaparan pada tahun 2009 (*Human Rights Watch*, 2009).

Menanggapi krisis kemanusiaan tersebut, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP), dan *Food and*

*Agriculture Organization* (FAO) memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bantuan makanan, obat-obatan, vaksin, peralatan medis, dan bantuan lainnya kepada negara-negara di Afrika. Sejalan dengan itu, Uni Eropa memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur kemanusiaan; AS memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bantuan medis, logistik, dan pendukung keamanan; sementara Cina telah menjadi aktor penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Afrika yakni bantuan keuangan, proyek pembangunan, dan bantuan teknis.

Sesuai perspektif Kleemans (2014b) bantuan kemanusiaan dapat dipandang sebagai hasil dari jaringan sosial dan modal sosial yang ada di antara negara-negara dan lembaga internasional. Jaringan sosial ini memungkinkan negara-negara dan lembaga-lembaga internasional untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan (PBB memberi bantuan kemanusiaan melalui lembaga-lembaga seperti UNICEF, WHO, dan WFP). Modal sosial, seperti kepercayaan, norma, dan relasi antar-aktor kemudian memfasilitasi kerja sama ini dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antar pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, bantuan kemanusiaan yang diberikan negara-negara dan lembaga internasional sehubungan dengan krisis di Afrika dapat dilihat sebagai interaksi kompleks antara jaringan sosial dan modal sosial sesuai dengan pendekatan jejaring sosial milik Kleemans (2014b).

### ***Teori Ketergantungan (Dependency Theory)***

Dalam Hubungan Internasional, teori ketergantungan menyoroti hubungan antara negara-negara — baik itu negara maju maupun negara pinggiran — di mana negara pinggiran menjadi bergantung kepada negara-negara maju dalam melakukan aktivitas seperti investasi, teknologi, pasar, dan bantuan ekonomi (Mahoney & Rodriguez-Franco, 2018). Sebagai akibatnya, negara-negara pinggiran menjadi terjebak dalam pola ketergantungan yang sulit untuk diubah. Dalam kaitannya dengan *Snakeheads* Cina, teori ketergantungan dapat menjelaskan hubungan ketergantungan antara jaringan *Snakeheads* Cina dengan jaringan lokal, nasional, dan internasional untuk memfasilitasi aktivitas penyeludupan manusia yang mereka lakukan (Kleemans, 2014b). Mereka biasanya menggunakan relasi sosial dan jaringan kriminalnya untuk membangun dan mempertahankan koneksi dengan pemerintah, pejabat imigrasi korup, serta jaringan kriminal lokal dan internasional dalam melaksanakan operasi penyeludupan. Selain itu, mereka memanfaatkan hubungan

ketergantungan itu untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan mereka terhadap upaya penangkapan maupun pemberantasan oleh pihak berwenang.

## **Pembahasan**

### ***Human Smuggling Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional***

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNODC) mendefinisikan penyelundupan sebagai “pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negaranya atau penduduk tetap” (UNODC, 2004). Dalam konteks penyelundupan manusia oleh *Snakeheads*, para migran yang diselundupkan biasanya memiliki kehidupan yang layak sehingga mampu membayar untuk pergi ke Amerika Serikat. Jarang diantara mereka yang dalam kondisi miskin dan putus asa, melainkan mereka justru gampang tergoda untuk menjadi kaya (Nizmi, 2016). Keberadaan penyelundup manusia di Cina lalu membuktikan karakteristik TOC yang tidak hanya terbatas pada konteks negara miskin, tetapi juga negara maju yang dicirikan oleh tingkat ketimpangan sosial, kecemburuan, atau diskriminasi sosial dan ekonomi yang tinggi dalam masyarakatnya.

### ***Pergerakan Penduduk Fujian dan Rute Penyelundupan***

Menurut Zhang dalam Nizmi (2016), pada tahun 1990, *United States Immigration and Naturalization Service* (USCIS) melaporkan bahwa 90 persen imigran ilegal di Amerika Serikat berasal dari provinsi Fujian, Cina. Fujian lalu dikenal sebagai pusat kegiatan penyelundupan manusia, di mana sebagian besar penyelundup juga merupakan penduduk Fujian (Nizmi, 2016). Ada banyak alasan fenomena ini terjadi di Fujian. Pertama, Fujian memiliki sejarah panjang penyelundupan melalui laut, dan telah menjadi rahasia umum di antara penduduknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Situasi ini telah terjadi sejak konflik antara pemimpin dinasti Qing dan pendukung Ming yang menyebabkan migrasi besar-besaran ke Taiwan dan Asia Tenggara yang diprakarsai oleh penduduk Fujian. Kedua, motivasi penduduk Fujian untuk bekerja di luar negeri, terutama AS, sehingga dapat mengirimkan uang ke kampung halaman. Ketiga, untuk memenuhi status sosial penduduk Fujian. Menurut mereka, jika salah seorang anggota keluarga tidak ada yang bekerja di luar negeri, maka mereka tidak memiliki “muka” (Liu & Pappas, 2003).

Oleh karena itu, Fujian tetap menjadi pusat kegiatan penyelundupan orang dari tahun ke tahun.

Penyelundupan dari Fujian ke Amerika Serikat semakin masal oleh karena koordinasi yang erat dari para penyelundup dengan perekrut lokal di Fujian, serta pertumbuhan jaringan transportasi internasional (Wang, 1996). Meski tidak menutup kemungkinan adanya migran yang sengaja mengikuti aktivitas penyelundupan ini dengan motif ekonomi, namun banyak pula dari mereka yang dijual oleh penyelundup dengan biaya yang setimpal. Pelaku penyelundupan sering kali mengawali motifnya dengan menipu para migran mengenai proses perekrutan kerja, dan para migran cenderung percaya bahwa eksploitasi dan biaya yang mereka keluarkan adalah proses yang memang harus dialami untuk mendapatkan uang. Biaya penyelundupan dari Cina ke AS mencapai US \$60,000 per kepala pada tahun 2003; sedangkan ibu 2 anak yang tiba di Amerika mengatakan bahwa dia membayar US \$140.000 kepada penyelundup (Zhang & Chin, 2001). Sejak saat itu, harga bisnis penyelundupan manusia dipercaya terus meningkat.

Adapun sejumlah rute dalam penyelundupan manusia dari Cina ke Amerika adalah: (1) penerbangan ke beberapa titik transit di luar Cina seperti Meksiko atau Kanada, setelah itu baru diselundupkan secara ilegal ke Amerika; (2) penerbangan menggunakan dokumen palsu dari tempat-tempat di luar Cina seperti Myanmar dan Thailand dengan tujuan ke beberapa negara di Amerika; dan (3) penyelundupan orang tanpa passport melalui jalur laut yaitu kapal kargo dan kapal pukat ikan ke Amerika (Zhang & Chin, 2003). Bangkok merupakan tempat transit penting karena korban penyelundupan biasanya ditempatkan di sana untuk waktu yang cukup lama; sementara Meksiko adalah tempat transit penting untuk penyelundupan jalur laut dengan tujuan Amerika Utara seperti Guatemala dan Panama (Nizmi, 2016). Setelah tiba di Meksiko, korban penyelundupan dipindahkan ke Los Angeles baru ke kota-kota lain seperti New York. Para penyelundup mampu membuat dokumen palsu seperti paspor, visa, dan kartu tempat tinggal (*residence cards*) dengan tujuan ke banyak negara guna mempermudah proses penyelundupan.

Pada abad 21, Chinatown di New York telah menjadi saksi dari sebuah pertumbuhan yang signifikan dari populasi penduduk Fujian. Mereka merupakan “darah baru” di New York dan mayoritas dari mereka bekerja di toko-toko, kedai makanan, dan agensi tenaga kerja di AS (Kyle & Liang, 2001). Jaringan *Snakeheads* yang tinggal di

Taiwan dan New York City memiliki hubungan dengan orang-orang Fujian di Amerika Serikat. Zhang & Chin (2003) mengutarakan bahwa penyelundupan jaringan Snakeheads dari Cina ke AS dikategorikan menjadi dua kelompok: *Snakeheads* besar dan kecil. *Snakeheads* besar (*da shetou*) umumnya terdiri dari para pebisnis kaya yang punya koneksi yang sangat luas dengan pihak-pihak penyelundup dan informasi terkini terkait rute-rute penyelundupan baru (Zhang & Chin, 2001). Mereka menyediakan “jembatan” antara orang-orang di negara yang berbeda, dan antara jaringan kriminal dan dunia hukum (Kleemans, 2014a). Mereka berada di seluruh wilayah Cina untuk mengawasi proses penyelundupan dan berperan dengan cara menginvestasikan uang. Hampir semua *Snakeheads* besar adalah warga negara Amerika atau pemegang kartu *green card*, dan beberapa dari mereka telah tinggal di Cina lebih lama dibanding di Amerika untuk memperluas jaringan yang terlibat (Nizmi, 2016). Sementara itu, *Snakeheads* kecil (*xiao shetou*) bekerja terutama sebagai perantara atau perekrut, penagih hutang, pemandu, awak kapal, pengangkut, dan pejabat korup dalam komunitas lokal Cina, di mana pendapatan mereka didapat melalui pembayaran dari para pelanggan penyelundupan (Chin, 2014). Mereka cenderung menetap di wilayah-wilayah Cina dan tidak memiliki akses untuk masuk-keluar secara bebas dari Cina. Hubungan saling percaya dan relasi baik antara *Snakeheads* besar maupun kecil berperan penting dalam keberlangsungan jaringan penyelundupan, yang didapat dan dijalin melalui ikatan keluarga atau ikatan sosial yang kuat dan berkelanjutan.

### ***Strategi Bertahan: Struktur Organisasi dan Target Klien***

Selanjutnya, Kleemans (2014b) mengemukakan dua temuan utamanya mengenai jaringan penyelundupan manusia yakni; fleksibilitas dan ketahanan mereka terhadap penangkapan. Fleksibilitas dijelaskan melalui istilah “efek bola salju sosial” untuk menggambarkan bagaimana pelaku penyelundupan terlibat dalam kejahatan terorganisir transnasional dan bagaimana karir mereka berkembang. Pada faktor fleksibilitas ini, pelaku mengandalkan sumber daya relasi, finansial, dan pengetahuan mereka untuk berhubungan dengan jaringan kriminal dengan memanfaatkan relasi sosial mereka. Kondisi ini secara singkat juga telah dielaborasi melalui pendekatan jejaring sosial. Sifat jaringan kriminal *Snakeheads* juga menjelaskan ketahanan, di mana tidak ada yang benar-benar permanen dalam jaringan kelompok kriminal. Sebab orang penting yang

tergolong *Snakeheads* besar seperti investor, pejabat korup, penyelenggara dan fasilitator sekalipun, dapat digantikan oleh orang lain.

Hal tersebut juga menjadi alasan utama mengapa kegiatan penyelundupan manusia sering kali tampak hanya mengalami sedikit kerusakan akibat penangkapan oleh aparat penegak hukum dalam jaringannya. Penangkapan penegak hukum hanya akan menghilangkan sebagian rantai jaringan penyelundup. Akan tetapi, mereka akan dengan mudah memperbaikinya kembali. Fleksibilitas dan ketahanan juga dijelaskan dengan bagaimana *Snakeheads* sebagai jaringan penyelundupan manusia yang kompleks telah terbentuk secara global dan mampu merespons berbagai ketidakpastian dan kendala hukum yang melekat dalam bisnis ilegal secara efektif (Kleemans & Van de Bunt, 1999). Dengan kata lain, kegiatan penyelundupan manusia sebagai TOC membutuhkan berbagai dukungan logistik, mulai dari keuangan dan perencanaan hingga eksekusi operasi, yang semuanya kompleks dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh individu atau *Snakeheads* kecil, melainkan juga membutuhkan keterlibatan *Snakeheads* besar, koneksi dengan pemerintah, pejabat imigrasi korup, serta jaringan kriminal lokal dan internasional dalam melaksanakan operasi penyelundupan. Hal ini menandakan bahwa mereka secara terutama mengandalkan jaringan aliansi atau relasi dan modal sosial yang mereka miliki.

Kemudian, fleksibilitas dan ketahanan *Snakeheads* juga dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih umum, di mana para penyelundup dapat juga terdiri dari warga negara biasa. Namun, warga negara tersebut biasanya memiliki jaringan kekeluargaan dan kontak sosial yang kebetulan terlibat dengan individu yang mengikutsertakan mereka ke dalam kegiatan perdagangan yang menguntungkan dalam pengiriman kargo manusia ke seluruh dunia. Mereka juga merupakan kelompok agen yang membentuk jenis jaringan internasional yang fleksibel dan berkembang seiring berjalannya waktu. Karena sifat kegiatan penyelundupan manusia adalah bisnis yang terlarang dan mengingat adanya ketakutan permanen akan penangkapan pelaku, maka mereka yang terlibat memperkuat ketahanan mereka akan penangkapan dengan berusaha membaaur dengan masyarakat sekitar agar tidak terlihat menonjol. Sehubungan dengan relasi sosial, pihak penyelundup dan klien (migran yang diselundupkan) sering diperkenalkan oleh seorang kenalan yang juga menjamin reputasi baik penyelundup. Pertemuan di rumah migran kemudian diatur untuk membahas mekanisme perjanjian; dan pembuatan kesepakatan penyelundupan di

negara asal relatif akan lebih mudah daripada di negara transit (Campana & Varese, 2016).

Secara organisasional, kelompok penyelundupan manusia ini dapat digambarkan sebagai “gugus tugas”: kelompok dengan ukuran kecil yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap kendala dan ketidakpastian pasar internasional yang dinamis. *Snakeheads* mau tidak mau harus beradaptasi dengan serangkaian kondisi pasar yang berbeda antara berbagai negara. Pasar dalam konteks ini adalah kendala sosial-hukum dalam eksekusi bisnis penyelundupan. Selain itu, walau operasi penyelundupan mereka melibatkan tugas-tugas yang sangat terspesialisasi, struktur organisasi dalam birokrasi *Snakeheads* sangat terbatas secara vertikal (Zhang & Chin, 2003). Oleh karena formasi keanggotaan *Snakeheads* cenderung terjadi tanpa perencanaan, misalnya melalui pertemuan sosial yang kebetulan atau rujukan informal, dan aliansi tidak resmi. Hal ini dipahami sebagai sifat aliansi *Snakeheads* yang terbatas, namun tetap tersebar secara luas. Beberapa diantaranya ditemukan memiliki kendali mutlak atas seluruh operasi penyelundupan. Meskipun ada sedikit diferensiasi hierarkis, pembagian kerja telah berkembang di antara masing-masing agen yang terlibat. Setiap anggota beroperasi untuk memenuhi fungsi tertentu, misalnya, penyelundup dari luar negeri mendominasi dalam mengatur transportasi internasional dan mengembangkan jaringan global tempat pertemuan, sementara mereka yang berada di Cina bertugas merekrut klien dan memberikan jaminan pembayaran.

Adapun target klien dari *Snakeheads* bersifat terbatas namun tersebar secara geografis. Hal ini berarti para penyelundup harus tetap berhati-hati dalam menyaring klien potensial mereka terkait kemampuan mereka dalam melakukan pembayaran sesuai biaya yang telah disepakati di awal. Hanya mereka yang memiliki kerabat dekat di AS atau kemampuan untuk mengumpulkan uang di antara teman atau keluarga mereka lah yang cenderung mendapatkan kepercayaan dan dianggap sebagai “risiko yang layak” oleh para penyelundup. Penyelundup terlebih dahulu perlu memastikan bahwa klien tersebut bukanlah aparat hukum dan tidak akan melaporkan mereka ke pihak berwenang; atau memastikan bahwa klien bukan bagian dari “perusahaan” pesaing. Pada saat yang sama, beberapa migran yang diselundupkan juga memastikan bahwa penyelundup tersebut adalah penyelundup asli dan bukan, misalnya, seorang pedagang manusia. Dengan kata

lain, klien atau migran ingin memastikan bahwa dia akan mendapatkan layanan yang dijanjikan penyelundup dengan tingkat kualitas yang disepakati.

Campana & Varese (2016) menjelaskan beberapa cara yang dilakukan penyelundup seperti perjalanan yang aman hingga ke negara tujuan, mengeliminasi tindakan eksploitatif, dan meminimalkan risiko bentuk paksaan dalam pekerjaan klien migran. Di sisi lain, Campana (2020) juga mengungkapkan bahwa terdapat pula imigran gelap – terutama yang datang ke Cina – yang dianiaya ketika mereka tidak mampu membayar biaya penyelundupan. Klien yang tidak membayar biaya penyelundupan secara penuh di awal perjalanan penyelundupan akan disandera dan ditahan di rumah persembunyian pada saat kedatangan. Mereka hanya akan dibebaskan setelah mereka membayar seluruh biaya penyelundupan. Penyelundup lalu mengenakan biaya yang besar atas pemantauan migran yang ditahan tersebut, karena kecil kemungkinan biaya tersebut untuk dibayarkan secara cepat (Campana, 2020).

Strategi lain yang dikembangkan *Snakeheads* adalah dengan menawarkan semacam jaminan, yakni jika suatu perjalanan penyelundupan tidak berhasil, para migran atau klien akan menerima tawaran dalam penyelundupan berikutnya tanpa dikenakan biaya tambahan. Inilah kemudian yang menjadi alasan mengapa kegiatan penyelundupan oleh *Snakeheads* dari Cina ke AS sangatlah terkenal, selain karena tingginya jumlah klien yang dipertaruhkan dan harga penyelundupan yang melambung tinggi.

Penyelundupan manusia, seperti banyak pasar legal lainnya, melibatkan persaingan dalam menarik pelanggan Campana (2020). Namun, hingga saat ini tidak ada mekanisme formal yang dibentuk oleh jaringan penyelundup, misalnya dalam hal menyelesaikan perselisihan, memastikan kepatuhan, dan menegakkan kontrak. Strategi *Snakeheads* dalam mengatasi masalah kepercayaan dan mendorong transaksi salah satunya dilakukan dengan berinvestasi dalam reputasi positif (Campana, 2020). Penyelundup berusaha untuk membangun dan menjaga reputasi mereka dengan memberlakukan adanya jaminan, membayar kompensasi jika terjadi insiden, dan menjaga relasi baik dengan tidak menutup kemungkinan untuk bertransaksi dengan klien yang sama di masa depan. Walau tidak mudah, reputasi penyelundup berperan secara signifikan di tingkat komunitas penyelundupan. Selain itu, kunci keberhasilan transaksi penyelundupan juga tidak luput dari ikatan dan interaksi sosial berdasarkan mekanisme kepercayaan (Granovetter, 1985; Wellman & Berkowitz, 1988). Sebagaimana penangkapan migran maupun penyelundup

adalah risiko utama yang ingin dihindari, maka mengelak ketidakpercayaan dalam relasi sosial adalah masalah yang terus berulang. Sebab kerja sama dalam dunia kejahatan terorganisir tidaklah mudah. Dari sini, tidak mengherankan jika penyelundup dan migran kemudian cenderung memiliki latar belakang etnis dan berasal dari tempat tinggal yang sama.

### ***Peran Perempuan Dalam Kesuksesan Proses Penyelundupan***

Dalam membangun reputasi positif, para penyelundup memanfaatkan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi dengan menggunakan media sosial dan internet untuk memasarkan layanan bisnis mereka. Selain itu, dari tahun ke tahun, kontribusi perempuan dalam kelompok terorganisir transnasional tercatat tinggi (Maeda, 2010). Zhang et al. (2007) menjelaskan bagaimana perempuan memainkan peran kunci dalam operasi penyelundupan, tidak seperti peran sekunder perempuan dalam sebagian besar jaringan kriminal lainnya. Hal ini terjadi terutama di Asia sebagai tempat terjadinya kejahatan terorganisir yang cukup mendominasi (Maeda, 2010). Dalam sebagian besar kasus, perempuan bekerja untuk atau bersama pasangan laki-laki, namun tidak jarang dari mereka yang bekerja secara mandiri.

Perempuan sering kali ditemukan terlibat dalam semua tahap penyelundupan manusia, diantaranya sebagai perekrut, pengusaha, pengelola rumah sandera, atau sekedar menyediakan layanan pendamping. Perempuan juga telah diidentifikasi bekerja sebagai perekrut klien secara aktif dalam eksploitasi perempuan dan anak perempuan di rumah bordil di berbagai negara di Asia, terutama di Cina (Maeda, 2010). Masuknya perempuan ke dalam usaha penyelundupan manusia, serta basis klien mereka, berasal dari jaringan pribadi atau relasi sosial mereka yang dekat. Dalam artikel ini, peran perempuan merupakan suatu keunikan dari aktivitas penyelundupan yang dilakukan oleh *Snakeheads* Cina. Kasus penyelundupan manusia oleh *Snakeheads* Cina ini lalu menunjukkan bahwa konteks organisasi sama pentingnya untuk memahami stratifikasi gender dalam perusahaan gelap dan juga dalam perekonomian formal (Zhang et al., 2007).

Menurut Keefe (2014) dan Maeda (2010), *Snakeheads* sebagai kelompok jaringan penyelundupan manusia dibangun oleh pengusaha kriminal Cina yang kejam yaitu *Cheng Chui Ping*, atau disebut juga *Sister Ping*. Ia dikenal sebagai “*Mother of all Snakeheads*” dan telah menghasilkan keuntungan melebihi puluhan juta dolar AS dari bisnis

perdagangan dan penyelundupan manusia yang telah dijalaninya (Keefe, 2014; Maeda, 2010). Selama 20 tahun kepemimpinannya, salah satu peristiwa bersejarah yang melibatkan *Sister Ping* adalah operasi penyelundupan kapal Golden Venture. *Sister Ping* sebagai pelopor penyelundupan telah tergolong sukses berkat kekerasan dalam penyelundupan manusia Cina yang terbatas dan peran perempuan yang unggul dalam jaringan penyelundupan (Maeda, 2010).

Walau sejatinya merupakan seorang kriminal, *Sister Ping* sendiri tetap dipandang sebagai seorang pahlawan yang mengawal satu generasi imigran untuk keluar dari kemiskinan di Cina menuju kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Chinatown di New York dan banyak penduduk Fujian masih konsisten mendukung keberadaan *Sister Ping* sebagai pahlawan imigrasi. Pada 1994 ketika Bill Clinton memerintahkan tindakan kebijakan keras terhadap penyelundupan imigran di Amerika, Ping menyelip ke luar negeri dan kembali ke desa asalnya di Cina. Dari sana, Ia tetap menjalankan bisnis penyelundupannya; hingga pada tahun 1998 saat salah satu kapal yang berisi para imigran dari Cina kecelakaan dan tertangkap oleh aparat hukum di lepas pantai Guatemala menewaskan empat belas migran dari Cina, menyebabkan tertangkapnya *Sister Ping* beberapa tahun kemudian di Hong Kong, yakni pada tahun 2000 (Keefe, 2014).

*Sister Ping* kemudian meninggal pada 2014 karena penyakit kanker pankreas yang dideritanya saat sedang ditahan Texas. Ia dikenakan hukuman tiga puluh lima tahun penjara karena mengoperasikan jaringan penyelundupan manusia terbesar yang telah berkembang sedemikian rupa dan melibatkan keterlibatan migran yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa keterlibatan Ping, *Snakeheads* sebagai jaringan penyelundupan manusia tampaknya masih kuat—walau tidak sestabil dulu—dengan pemimpin barunya yang belum diketahui. Perkembangan *Snakeheads* tanpa Ping berevolusi mengikuti perkembangan zaman menggunakan aplikasi media sosial milik Cina seperti Tinder, MoMo, serta WeChat, dalam mempromosikan bisnis penyelundupan dengan slogan yang menjanjikan “perjalanan aman 100 persen”.

Siapa sangka, pemanfaatan aplikasi dan media sosial tersebut memberikan sejumlah manfaat dalam mempromosikan bisnis ilegal mereka, diantaranya: 1). Anonimitas, melalui aplikasi, *Snakeheads* dapat menjaga anonimitas mereka sehingga menjadi sulit untuk diidentifikasi oleh pihak berwenang; 2). Komunikasi terenkripsi, aplikasi seperti WeChat menawarkan fitur enkripsi pesan sehingga memberikan

keamanan tambahan dalam berkomunikasi serta menjaga kerahasiaan transaksi; 3). Target yang efektif dan jangkauan yang Luas. Media sosial Cina cenderung dirancang memiliki kemampuan untuk menargetkan kelompok atau individu tertentu melalui fitur pencarian dan analisis data pengguna, sehingga *Snakeheads* dapat menasar calon korban secara efektif dan luas, mengingat pengguna media sosial di Cina juga sangat tinggi dan tersebar luas. 4). Pemasaran yang terstruktur, dengan slogan “perjalanan aman 100 persen” di platform media sosial akan memungkinkan *Snakeheads* untuk memasarkan bisnis mereka melalui layanan yang memprioritaskan keamanan, oleh karena hal ini menarik perhatian dan minat calon migran untuk melakukan transaksi. Inilah yang menjadi faktor utama keberadaan *Snakeheads* cenderung hilang dari perbincangan atau “tenggelam”. Penangkapan *Sister Ping* sebagai pelopor bisnis penyelundupan manusia dan kematiannya diyakini telah menyebabkan penurunan jumlah pada kasus penyelundupan manusia, walau sejatinya *Snakeheads* masih ada dan menjalankan bisnis penyelundupannya di luar sana.

Secara umum, belum dapat dipastikan mengapa penyelundup perempuan memimpin beberapa organisasi penyelundupan terbesar (Soudijn, 2006). Beberapa alasan diantaranya meliputi tidak adanya stigma sosial yang melekat pada penyelundupan manusia sebagai peluang yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang diminati perempuan, sebab penyelundupan manusia umumnya tidak dilihat di komunitas migran sebagai kejahatan serius. Penyelundupan manusia juga lebih dikenal sebagai bisnis yang berorientasi pada laki-laki karena perempuan dianggap kurang mengancam secara fisik, dan dengan demikian memiliki keunggulan dalam membangun reputasi yang lebih baik untuk merekrut klien. Sebab, para migran bukanlah korban yang malang, melainkan mereka secara sadar menggunakan layanan yang disediakan oleh penyelundup (Soudijn, 2006). Beberapa kasus penganiayaan terburuk terhadap migran juga terjadi dalam organisasi yang dipimpin perempuan.

### ***Pola Interaksi dan Keanggotaan: Aliansi Sementara***

Secara operasional, *Snakeheads* sebagian besar terlibat dalam transaksi *dyadic*: hubungan interaksi yang terjalin secara khusus antara dua orang; dan sebagian besar digambarkan oleh hubungan antara penyelundup dengan migran yang diselundupkan (Zhang & Chin, 2003). Hal ini dilakukan berdasarkan relasi sosial guna membangun kepercayaan sebelum

melakukan transaksi penyelundupan. Karena sebagian besar hubungan *dyadic* ini melibatkan jarak yang sangat jauh, keberhasilan seluruh operasi sangat bergantung pada keberhasilan setiap hubungan pada setiap tahap dalam proses penyelundupan. Kecelakaan apa pun di sepanjang rantai interaksi *dyadic* ini dapat mengakhiri operasi atau bahkan bisnis ilegal penyelundupan. Karena transaksi penyelundupan manusia melibatkan serangkaian tahapan operasional yang berpotensi berbahaya karena dapat sewaktu-waktu tertangkap, maka semakin sedikit jumlah orang yang terlibat dalam jaringan penyelundupan atau mengetahui tentang aktivitasnya, maka semakin besar peluang keberhasilan operasional penyelundupan (Zhang & Chin, 2003).

Selain itu, semakin sedikit jumlah keanggotaan dalam bisnis penyelundupan manusia, maka semakin tinggi keuntungan yang didapat oleh setiap anggota atau pelaku penyelundupan yang terlibat. Jumlah keanggotaan *Snakeheads* yang sedikit juga mempermudah mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kendala pasar. Meskipun persamaan latar belakang dipercaya dapat meningkatkan pemahaman dan harapan bersama dalam kegiatan penyelundupan, sebagaimana dikemukakan oleh Feld (1981), persamaan ini bukanlah syarat bagi penyelundup baru untuk bergabung dalam operasi penyelundupan. Lebih dari itu, ekspektasi dan komitmen bersama lebih mudah dibangun dan dalam kelompok kecil guna meningkatkan kelancaran seluruh proses transaksi penyelundupan.

Bersamaan dengan itu, meski memberikan kontribusi terhadap ketahanan akan penangkapan dan kelancaran transaksi penyelundupan, hubungan interaksi *dyadic* tidak luput dari konsekuensi negatif yang berpotensi untuk muncul. Karena adanya kebutuhan akan kerahasiaan dan anonimitas dalam hubungan interaksi penyelundupan, jika informasi dan instruksi yang dibutuhkan tidak tersampaikan dengan baik, maka hal inilah yang menjadi konsekuensi dari hubungan *dyadic* tersebut. Misalnya, sebagian besar kasus penyelundupan manusia yang tertangkap oleh aparat penegak hukum diakibatkan oleh insiden tak terduga, seperti kegagalan saat melewati layanan imigrasi di pelabuhan negara tujuan; atau penundaan serta kegagalan dalam jadwal pengiriman “kargo” yang dijanjikan tepat waktu. Menurut Zhang & Chin (2003), kegiatan penyelundupan manusia beberapa kali berjalan berantakan karena kehilangan pemain kunci dalam operasi transnasional; banyak *Snakeheads* terpaksa melakukan penarikan dana investasi

(divestasi) dan beralih ke bisnis lain yang lebih menjanjikan. Kondisi seperti ini tentu saja mempengaruhi kelancaran transaksi bisnis penyelundupan.

Hal penting lainnya yang dapat menjelaskan unsur fleksibilitas dan ketahanan *Snakeheads* sebagai kegiatan penyelundupan manusia dapat dicirikan oleh aliansi mereka yang bersifat sementara serta keterlibatan sporadis: dibentuk dan dibubarkan secara cepat setelah operasinya selesai (Zhang & Chin, 2003). Aliansi sementara ini kemudian menyebabkan tidak adanya rencana jangka panjang yang dimiliki *Snakeheads* untuk terlibat dalam bisnis di kemudian hari, di mana kondisi ini lahir dari ketidakpastian yang melekat dalam bisnis penyelundupan manusia itu sendiri. Tidak seperti perjudian, prostitusi, dan kegiatan pemerasan tradisional lainnya yang terikat pada individu dan lokasi tertentu untuk keuntungan jangka panjang, kegiatan penyelundupan manusia sebagai bisnis yang sangat menguntungkan ini hanya melibatkan satu kali transaksi. Aliansi sementara ini juga berdampak bagi tidak adanya mekanisme khusus yang mengatur kontrak keanggotaan para penyelundup. Akibatnya, kebanyakan anggota *Snakeheads* memiliki bisnis sah lainnya, sebab kegiatan penyelundupan manusia ini hanya memakan sebagian kecil dari waktu mereka, meskipun keuntungannya tidak dapat dipungkiri telah melebihi keuntungan bisnis lainnya tersebut. Dari sini, tidak terlibatnya para pelaku penyelundupan dalam bisnis penyelundupan manusia untuk waktu yang lama juga dapat menjelaskan unsur fleksibilitas *Snakeheads* dalam menghadapi ketidakpastian pasar internasional.

Lebih jauh, pola interaksi *dyadic* atau aliansi sementara yang dominan dalam aktivitas *Snakeheads* Cina dapat dijelaskan dari perspektif *Transnational Organized Crime* (TOC) dan *Transnationalism*. Dalam perspektif TOC, aliansi sementara sering kali menjadi karakteristik utama dari jaringan kriminal transnasional. Kelompok kriminal seperti *Snakeheads* Cina cenderung membentuk kemitraan yang fleksibel dan tidak permanen dengan aktor lain, termasuk dengan kelompok kriminal lokal dan internasional, pejabat korup, dan individu-individu yang terlibat dalam proses perdagangan manusia. Dari sudut pandang transnasionalisme, pola interaksi *dyadic* juga dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari konektivitas lintas batas yang kuat dalam jaringan kriminal. Kelompok seperti *Snakeheads* Cina memanfaatkan hubungan dan jaringan yang melintasi berbagai batas negara untuk memfasilitasi operasi penyelundupan mereka. Didukung oleh

globalisasi, mereka tidak terikat oleh batasan negara dan sering kali beroperasi di berbagai negara secara bersamaan.

Dalam konteks *Snakeheads* Cina, kedua perspektif ini dapat dibuktikan dengan fenomena penyelundupan yang dibahas. Aktivitas jaringan *Snakeheads* Cina tersebut mencerminkan karakteristik interaksi aliansi sementara yang sering kali ditemukan dalam TOC, serta memanfaatkan konektivitas lintas batas yang kuat yang menjadi fokus dari transnasionalisme. Namun, terdapat keunikan dalam diskursus mengenai *Snakeheads* Cina dalam konteks TOC. Mereka memiliki keahlian khusus dalam operasi penyelundupan manusia, yang membedakan mereka dari kelompok kriminal lainnya yang mungkin terlibat dalam perdagangan narkoba atau senjata. Selain itu, *Snakeheads* Cina sering kali memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas Cina di berbagai negara, bahkan dengan komunitas di Amerika Serikat, yang juga memengaruhi dinamika dan strategi operasional mereka.

### ***Respons dan Upaya Otoritas Penegak Hukum***

Pada dasarnya, PBB telah berupaya untuk mencegah dan memerangi terjadinya penyelundupan para migran guna menjamin hak asasi manusia dari seluruh korban penyelundupan (UNODC, 2004). Beberapa upaya tersebut meliputi kolaborasi antar negara-negara terlibat untuk bersama-sama melakukan kontrol di wilayah perbatasan serta memperkuat komunikasi antar lembaga atau agensi yang mengawasi perbatasan. PBB juga membentuk *Conference of Parties* (COP) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang bertujuan untuk menerapkan mekanisme pengumpulan informasi terkait pencegahan TOC (Saadah, 2021). Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya oleh karena belum ada norma dan prinsip dalam COP yang memaksa negara untuk merasa terancam atas keberadaan TOC.

Kepatuhan negara anggota UNODC terhadap mekanisme COP juga masih rendah akibat belum adanya mekanisme yang dapat memaksa negara untuk menyediakan data yang lengkap mengenai kondisi TOC di negara tersebut (Caparini, 2019). Dalam konteks Cina, *National Central Bureau* (NCB) Cina yang merupakan bagian dari Kementerian Keamanan Publik (*Ministry of Public Security*, MPS) Cina telah menyediakan unit-unit investigasi khusus yang beroperasi di kota-kota besar maupun kabupaten di Cina, sebagai upaya kerja sama untuk mengatasi TOC, termasuk penyelundupan manusia (Interpol,

n.d.). Interpol juga telah berdiri sebagai institusi yang bergerak dalam pemberantasan TOC yang kewenangannya mencakup kerja sama kepolisian antarnegara dalam lingkup transnasional.

Namun, mengutip Williams & Godson (2002), terdapat sejumlah keterbatasan hukum yang dihadapi oleh Interpol dan kepolisian antar-negara dalam prosesnya: (1) keterbatasan yurisdiksi; dan (2) keterbatasan harmonisasi hukum. Dalam konteks kurangnya harmonisasi hukum, perbedaan dalam sistem hukum antara Cina dengan negara-negara terlibat lainnya seperti AS dan negara transit dapat menghambat penuntutan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional. Kesepakatan internasional pada dasarnya dapat memfasilitasi harmonisasi hukum antara negara-negara, memudahkan proses ekstradisi, dan meningkatkan kerja sama dalam penuntutan dan penegakan hukum. Namun, kurangnya landasan yang kuat dalam kesepakatan internasional atau hukum internasional antar negara tentu menjadi masalah tersendiri (Williams & Godson, 2002). Sebagaimana kejahatan transnasional sering kali melintasi batas negara, sehingga menjadi sulit bagi satu negara untuk menangani masalah tersebut sepenuhnya tanpa harmonisasi hukum internasional antar-negara. Dengan demikian, penguatan lembaga internasional seperti Interpol dan UNODC sangat diperlukan oleh karena keduanya memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antara negara-negara dalam menanggulangi TOC.

Menurut Naim (2010), korupsi dalam lembaga pemerintah dan penegakan hukum di beberapa negara juga dapat menghalangi upaya penuntutan terhadap pelaku kejahatan transnasional. Negara-negara transit di Myanmar dan Thailand mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan untuk mengatasi kejahatan transnasional secara efektif (Naim, 2010). Dari sini, pengembangan kapasitas dalam lembaga pemerintah perlu diutamakan. Negara-negara yang memiliki sumber daya terbatas dapat mendapatkan dukungan dari negara-negara lain dan organisasi internasional dalam pengembangan kapasitas untuk menangani kejahatan transnasional.

Secara khusus, Cina telah melakukan negosiasi dan diplomasi dengan beberapa negara sebagai upaya kerja sama untuk menanggapi kasus penyelundupan manusia. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah mengirimkan perwakilannya ke Cina untuk mendiskusikan isu ini dan melakukan perjalanan langsung ke provinsi Fujian untuk

mengamati situasi di sana (Nizmi, 2016). USCIS bersama dengan MPS Cina membentuk grup penghubung di Beijing untuk mengadakan pertemuan rutin terkait isu penyelundupan dan perdagangan manusia (Chin, 2014). Pada saat yang sama, Departemen Imigrasi Australia mengirim agen khusus ke Beijing dan Guangzhou untuk menginvestigasi warga secara langsung terkait kasus penyelundupan di perbatasan (Chin, 2014). Sementara itu, di Amerika Serikat, terdapat badan-badan federal seperti Biro Investigasi Federal (*Federal Bureau of Investigation*, FBI) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*, DHS) bersama dengan departemen kepolisian setempat telah terlibat dalam investigasi TOC Cina (Chin, 2014). Ada pula kegiatan polisi anti-penyelundupan yang bertugas menyelidiki dan membuktikan koneksi serta keberadaan kelompok mafia Cina di Amerika. Oleh karena itu, diperlukan konsensus yang kuat dan kerja sama transnasional dari seluruh lembaga dan pemerintahan di berbagai negara dalam menanggapi kasus *Snakeheads*.

Cina juga telah berpartisipasi dalam serangkaian konferensi internasional yang membahas upaya penanggulangan kejahatan terorganisir transnasional. Pada tahun 2003, perwakilan dari Cina menghadiri Konferensi Menteri Tingkat Regional yang membahas mengenai *People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* yang diadakan di Bali, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Bali Process*, di mana pertemuan tingkat menteri ini turut dihadiri oleh delegasi dari hampir seluruh negara di dunia (Chin, 2014). Pada kesempatan tersebut, Cina memahami bahwa kasus perdagangan dan penyelundupan manusia telah menjadi suatu kasus universal yang menyebar ke seluruh belahan dunia, terutama berkat bantuan globalisasi, sehingga alasan dibalik terjadinya kedua kasus ini pun telah berkembang menjadi sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak aspek.

Selanjutnya, pada 2004, Cina kembali hadir sebagai partisipan dalam kelanjutan pertemuan agenda kerja tersebut yang diselenggarakan di Australia. Pada kurun waktu 2001-2006, otoritas Cina sendiri telah menangkap lebih dari 30.000 pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia, menyelamatkan lebih dari 35.000 orang korban, serta menginvestigasi lebih dari 30.000 tersangka yang terlibat (Nizmi, 2016). Lebih jauh, Cina juga telah meningkatkan upaya kerja samanya dengan ASEAN sebagai organisasi regional, yakni melalui Konferensi Kepolisian ASEAN (*ASEAN Chiefs of National Police*, ASEANAPOL) pada tahun 2005 yang di dalamnya mencakup pembahasan

mengenai upaya kerja sama regional dalam menanggulangi perdagangan dan penyelundupan manusia lintas negara (Adhinata, 2012). Kesepakatan kerja sama regional tersebut kemudian diperkuat melalui Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, AMMTC*) yang dilaksanakan di Vietnam pada 2005. Selanjutnya, pada 2007, Cina bersama-sama dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam membentuk aliansi enam negara yang disebut dengan *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking (COMMIT)* untuk mengatasi kasus perdagangan dan penyelundupan manusia (Adhinata, 2012). COMMIT diwakili langsung oleh pemerintah dan membangun sistem kerja sama dan kolaborasi lintas batas yang melibatkan enam negara.

Hingga tahun 2015, keanggotaan *Bali Process* kini terdiri atas 45 negara anggota dan 3 organisasi internasional, yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi (*International Organization for Migration, IOM*), Komisaris Tinggi PBB Untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR*) dan Kantor PBB Untuk Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office On Drugs and Crime, UNODC*). Cina bersama dengan negara-negara anggota lainnya sepakat untuk mengutamakan diplomasi dengan tujuan untuk menjalin pertukaran informasi mengenai migrasi di kawasan baik secara regional maupun internasional, kerja sama penegakan hukum, kerja sama terkait sistem perbatasan, dan visa untuk mendeteksi dan mencegah migrasi ilegal (Utami, 2017). Sebab hal-hal mendasar inilah yang menjadi akar dari persoalan perdagangan dan penyelundupan manusia. Dari sini, pertemuan tingkat menteri ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terkait isu kejahatan terorganisir transnasional, sehingga setiap negara anggota dapat memperkuat perumusan undang-undang nasional untuk menindaklanjuti kasus penyelundupan dan perdagangan manusia.

Selain itu, pertemuan *Bali Process* ini juga mengangkat isu perlindungan hak asasi manusia kepada para korban, terutama perempuan dan anak (Utami, 2017). Di masa yang akan datang, agenda selanjutnya adalah upaya untuk peningkatan kerangka kerja sama kawasan dan internasional dalam menangani dan memberantas kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia sebagai bentuk TOC (Utami, 2017). Bersama dengan 45 negara anggota *Bali Process* lainnya yang meliputi Afghanistan, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Fiji, Filipina, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irak,

Jepang, Kamboja, Kiribati, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Perancis, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Samoa, Singapura, Solomon Islands, Srilanka, Suriah, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Vanuatu, Vietnam, dan Yordania, Cina menjadikan pemberantasan penyelundupan dan perdagangan manusia sebagai yang utama dalam pembahasan konferensi internasional tersebut. Cina mengedepankan upaya untuk meningkatkan kerangka kerja sama kawasan dan internasional dalam menangani dan memberantas kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan terorganisir transnasional (Utami, 2017).

Meskipun kerja sama keamanan antarnegara-negara sering kali sulit dilakukan karena kepentingan nasional yang berbeda, namun adanya kesepakatan internasional yang teguh dan komitmen yang kuat dari negara-negara dapat membantu mengatasi tantangan tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil secara kolektif. Kesepakatan internasional adalah langkah penting dalam menanggulangi TOC khususnya dalam kasus *Snakeheads* Cina karena memberikan kerangka kerja bersama untuk mengatasi masalah tersebut secara kolektif. Hal ini juga dapat memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif antara negara-negara, serta membantu dalam identifikasi dan penangkapan pelaku kejahatan terorganisir transnasional. Meskipun kerja sama antarnegara sulit dilakukan, kesepakatan internasional dapat memberikan landasan hukum dan struktur untuk pertukaran informasi tersebut, dan juga sebagai mekanisme dasar untuk mengatur tindakan yang akan diambil baik oleh negara, badan, dan aparat yang terlibat; serta untuk menegakkan hukum lintas batas negara. Dengan demikian, kesepakatan internasional menjadi solusi kolektif dalam menanggulangi ancaman TOC.

### **Simpulan dan Saran**

Penyelundupan manusia oleh *Snakeheads* Cina telah menjadi salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional paling serius dan mendapat perhatian seluruh masyarakat dunia. Artikel ini menyoroti beberapa keunikan dari *Snakeheads* Cina dibandingkan kelompok TOC lainnya, diantaranya adalah keberadaan provinsi Fujian, peran kunci perempuan dalam operasi penyelundupan, dan keahlian khusus para penyelundup dalam kelancaran operasi penyelundupan manusia, yang membedakan mereka dari kelompok kriminal lainnya seperti dalam kasus perdagangan narkoba atau senjata. Adapun pola interaksi

*dyadic* yang dominan dalam aktivitas *Snakeheads* Cina menekankan bagaimana mereka membentuk aliansi sementara atau keterlibatan sporadis, dan secara khusus memanfaatkan hubungan dan jaringan yang melintasi berbagai batas negara untuk memfasilitasi operasi penyelundupan mereka. Pola perkembangan *Snakeheads* juga melibatkan jaringan internasional yang rumit serta mencakup berbagai titik transit dari orang dengan latar belakang terkemuka, sehingga mempersulit pemerintah dan badan-badan yang terlibat untuk mengawasi pergerakan mereka.

Menyadari isu kejahatan transnasional ini, berbagai upaya dan kerja sama telah dilakukan oleh pemerintah Cina, namun berbagai tantangan masih terpampang nyata di depan mata. Penelitian di masa depan harus mampu mengeksplorasi mobilisasi serta perkembangan terkini dari jaringan *Snakeheads*, oleh karena isu kriminal cenderung sulit ditelusuri secara *real-time*. Artikel ini merekomendasikan kerja sama lintas-batas dan pertukaran informasi antara seluruh pihak dan otoritas secara lebih siaga, baik di level nasional maupun internasional agar dapat mencegah kasus penyelundupan serupa di masa depan. Diantaranya meliputi penguatan otoritas keamanan dan imigrasi, polisi dan penegak hukum, Interpol dan Agensi Internasional, Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*, NGO), serta platform dan aplikasi di media sosial yang mungkin digunakan oleh *Snakeheads* dalam melakukan aktivitas ilegal.

## Daftar Pustaka

- Adhinata, M. B. P. (2012). Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1).
- Bolz, J. (1995). Chinese Organized Crime and Illegal Alien Trafficking: Humans as a Commodity. *Asian Affairs: An American Review*, 22(3), 147–158. <https://doi.org/10.1080/00927678.1995.9933705>
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford University press.
- Campana, P. (2020). Human smuggling: Structure and Mechanisms. *Crime and Justice*, 49(1), 471–519.
- Campana, P., & Varese, F. (2016). Exploitation in human trafficking and smuggling. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 22, 89–105. <https://core.ac.uk/download/pdf/42339082.pdf>
- Caparini, M. (2019). *UN Police and the Challenges of Organized Crimes*. SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute.
- Chin, K.-L. (2014). Chinese Organized Crime. In *The Oxford Handbook of Organized Crime* (pp. 219–233). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.013.002>
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research, planning, conducting, and evaluating qualitative and quantitative approaches*. SAGE Publication.

- Feld, S. L. (1981). The focused organization of social ties. *The American Journal of Sociology*, 86(5), 1015–1035. <https://pdodds.w3.uvm.edu/teaching/courses/2009-08UVM-300/docs/others/1981/feld1981.pdf>
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Infrastructure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91, 481–510.
- Human Rights Watch. (2009). *Kenya recruits Somali refugees to fight Islamists back home in Somalia*. Human Rights Watch. <http://hrw.org/en/news/200911/16/kenya-recruits-somali-refugees-fights-islamists-back-home-somalia>
- Interpol. (n.d.). *How Interpol supports China to tackle international crime*. Interpol. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/CHINA>
- Keefe, P. R. (2014, May 5). *Requiem for a Snakehead*. The New Yorker. <https://www.newyorker.com/news/news-desk/requiem-for-a-snakehead>
- Keohane, R. O., & Nye Jr, J. S. (1973). Power and Interdependence. *Power and Interdependence*, 15(4), 158–165. [http://slantchev.ucsd.edu/courses/ps240/05 Cooperation with States as Unitary Actors/Keohane & Nye - Power and interdependence \[Ch 1-3\].pdf](http://slantchev.ucsd.edu/courses/ps240/05%20Cooperation%20with%20States%20as%20Unitary%20Actors/Keohane%20&%20Nye%20-%20Power%20and%20interdependence%20[Ch%201-3].pdf)
- Kleemans, E. R. (2014a). Organizing human smuggling from China to Europe: Reflections on the Snakehead phenomenon. *Crime, Law, and Social Change*, 61(3), 267–284.
- Kleemans, E. R. (2014b). Theoretical Perspective on Organized Crime. In *The Oxford Handbook of Organized Crime* (pp. 32–52). Oxford University Press. [https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780199968923\\_A35478224/preview-9780199968923\\_A35478224.pdf#page=47](https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780199968923_A35478224/preview-9780199968923_A35478224.pdf#page=47)
- Kleemans, E. R., & Smit, M. (2014). Human smuggling, human trafficking, and exploitation in the sex industry. In *The Oxford Handbook of Organized Crime* (pp. 381–401). Oxford University Press.
- Kleemans, E. R., & Van de Bunt, H. G. (1999). The social embeddedness of organized crime. *Transnational Organized Crime*, 5(1), 19–36.
- Kyle, D., & Liang, Z. (2001). *Migration Merchants: Human smuggling from Ecuador and China* (43).
- Liu, M., & Pappas, L. (2003, July 3). *Bound for paradise: Fujian's emigration culture is deeply ingrained. Its migrants aren't poor, just eager to get rich*. Newsweek.
- Maeda, D. K. (2010). Transforming the representable: Asian women in anti-trafficking discourse. In *Confronting Global Gender Justice: Women's lives, human rights* (pp. 68–83). Routledge.
- Mahoney, J., & Rodriguez-Franco, D. (2018). Dependency Theory. *The Oxford Handbook of the Politics of Development*, 22–42.
- Martlew, N. (2009). *Band Aids and Beyond: Tackling Disaster in Ethiopia 25 years after de famine*. Oxfam Briefing Paper. <http://www.oxfam.org/files/bp133-band-aids-beyond.pdf>.
- Morselli, C. (2009). *Inside Criminal Networks*. Springer.
- Naim, M. (2010). *Illicit: How smugglers, traffickers and copycats are hijacking the global economy*. Random House.
- Nizmi, Y. E. (2016). Memahami Problematik Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyeludupan Orang di Cina. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 67–77.
- Poulin, R. (2003). Globalization and the Sex Trade: Trafficking and the Commodification of Women and Children. *Canadian Woman Studies/Les Cahiers de La Femme*.

- Retnowatik, F. W., & Pasan, E. (2021). Pelaksanaan Prinsip Responsibility To Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan & Nigeria). *Jurnal Sosial-Politika*, 2(1), 17–30.
- Saadah, K. (2021). Triads and The Abilities of Transnational Organized Crime to Prevail. *Jurnal Global Strategis*, 15(1), 127–148.
- Soudijn, M. R. J. (2006). *Chinese human smuggling in transit*. Leiden University.
- UNODC. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. [https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED\\_NATIONS\\_CONVENTION\\_AGAINST\\_TRANSNATIONAL\\_ORGANIZED\\_CRIME\\_AND\\_THE\\_PROTOCOLS\\_THERETO.pdf](https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf)
- Utami, P. (2017). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam. *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(4), 1257–1272.
- Wang, Z. (1996). Ocean-going smuggling of illegal Chinese immigrants: Operation, causation, and policy implications. *Transnational Organized Crime*, 2(1), 49–65.
- Wellman, B., & Berkowitz S. D. (1988). *Social structures: A network approach* (Vol. 15). Cambridge University Press.
- Williams, P., & Godson, R. (2002). Anticipating organized and transnational crime. *Crime, Law, and Social Change*, 37, 311–355.
- Zhang, S., & Chin, K.-L. (2001). Chinese Human Smuggling in the United States of America. In *Forum on Crime and Society* (2nd ed., Vol. 1, pp. 31–52). United Nations Center for International Crime Prevention.
- Zhang, S., & Chin, K.-L. (2003). The Declining Significance of Triad Society in Transnational Illegal Activities. A Structural Deficiency Perspective. *British Journal of Criminology*, 43(3), 469–488.
- Zhang, S., Chin, K.-L., & Miller, J. (2007). Women's participation in Chinese transnational human smuggling: a gendered market perspective. *Criminology*, 45(3), 699–733.